KURIKULUM DAN KONTROVERSI BUKU TEKS SEJARAH DALAM KTSP

Oleh
Siti Aisyah, S.Pd. I., M.Pd
NIDN: 0121058802

ABSTRACT

The 21st century is the century of knowledge that can affect all aspects of human life, and therefore must have a history teacher competence as a professional teacher of history means there must be a continuous effort enhance the professionalism of teachers, among others concerning the history of self-esteem as a profession carrier history teacher, mastery of a broad historical knowledge, in-depth and up to date, high-skill acquisition in the history learning strategy, creative and innovative attitude adaptable to the development and demands of the times. Another thing that is not less important is, a historian educators do not be afraid to give the material a controversial history, it is important to be able to train students in the school to be able to think critically analytical on the course of historical events, which KTSP gives wiggle room is so large that learning history is not boring.

Keywords: Curriculum, controversy, history textbooks.

I. PENDAHULUAN

Dalam masa pembangunan bangsa, salah satu fungsi utama pendidikan tidak lain ialah, pengembangan kesadaran nasional sebagai sumber daya mental dalam proses pembangunan kepribadian nasional beserta identitasnya. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik perwatakan yang tumbuh serta melembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Dengan demikian kepribadian nasional serta identitas bertumpu pada penglaman kolektif bangsa. Jadi, pada sejarahnya. Dalam konteks pembentukan identitas nasional, pengetahuan sejarah mempunyai fungsi fundamental. (Sartono Kartodirdjo, 2005: 121)

Sejak zaman kolonial Belanda pendidikan sejarah telah memegang peran penting dalam kurikulum di Indonesia. Suatu kenyataan yang ada bahwa dalam setiap perubahan kurikulum mata pelajaran sejarah selalu tercantum sebagai suatu mata pelajaran yang wajib dipelajari siswa. Memang dalam organisasi kurikulum

terjadi perbedaan, misalnya pada waktu kurikulum 1975 di mana sejarah merupakan bagian integral dari IPS tetapi dalam organisasi kurikulum semacam itu pun kedudukan sejarah tetap penting.

Dalam perjalanannya sebagai mata pelajaran dalam kurikulum SR/SD, SMP, SMA/SMU, dan SMK pelajaran sejarah diwakili oleh berbagai mata pelajaran. Sejarah adalah nama mata pelajaran yang digunakan di SD; Sejarah, Sejarah Indonesia/Kebangsaan, Sejarah Umum/Dunia digunakan baik di SMP maupun di SMU; Sejarah Kebudayaan, Sejarah Kesenian digunakan di SMU dan SMK. Apapun nama yang dipergunkan, pendidikan sejarah merupakan bagian penting dalam upaya mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan tugasnya di masa mendatang.

Permasalahan yang muncul adalah adakah peran pendidikan yang diemban sejarah akan berlangsung seperti yang ada pada saat sekarang ataukah suatu pemikiran baru sudah harus dikembangkan. Permasalah ini muncul jika diingat bahwa suasana kehidupan politik, sosial, budaya, ekonomi, negara dan bangsa pada awal-awal tahun kemerdekaan, bahwa pada awal Orde Baru dan awal reformasi sudah berbeda jauh dengan keadaan sekarang dan keadaan yang

akan datang. Sebagai wahana pendidikan, kurikulum sejarah sudah harus memperhitungkan perkembangan kehidupan masyarakat dan bangsa di masa sekarang dan masa mendatang, mengingat apa yang diperoleh siswa di sekolah dalam pendidikan sejarah di masa kini akan digunakan dan dijadikan bagian kehidupan mereka di masa mendatang. Masa mendatang anak tersebut dimulai ketika mereka menamatkan unit pendidikan tersebut dan berlangsung terus sampai mereka menyelesaikan tugasnya sebagai warga bangsa dan manusia (Hamid Hasan, 1996 : 136).

Namun ada apa dengan kurikulum sejarah? Itulah pertanyaan yang muncul di benak kita ketika mendengar berita terkait pelarangan beredarnya buku-buku teks sejarah untuk SMP-SMA sederajat oleh Kejaksaan Agung. Sebelum pelarangan itu dilakukan, beberapa waktu lalu kita pun sudah disuguhi pemberitaan di televisi, radio, maupu koran nasional terkait diperiksanya kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) oleh Kejaksaan Agung. Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan beredarnya buku sejarah untuk SMP-SMA sederajat yang tidak mencantumkan kata PKI di belakang penyebutan G 30 S (Gerakan 30 September), salah satu peristiwa sejarah politik yang pernah terjadi di Indonesia tahun 1965. Pertanyaan ini wajar muncul karena memang sudah sejak lama pelajaran sejarah di sekolah sering menimbulkan kontroversi. Sebut saja di antaranya keberadaan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) yang mengundang reaksi. PSPB dinilai sarat dengan kepentingan politik untuk melestarikan kekuasaan Orde Baru melalui penanaman “nilai-nilai” sejarah perjuangan bangsa sejak kemerdekaan sampai masa pemerintahan Orde Baru. Ada lagi soal konflik dalam penyusunan buku babon setebal enam jilid berjudul Sejarah Nasional Indonesia, yang berakhir dengan mundurnya beberapa sejarawan penulisnya yang ingin tetap mempertahankan prinsip akademis daripada harus mengikuti kemauan penguasa. (http://www.atmajaya.

ac.id/content.asp?f=0&id=3549). Demikian pula analisis terhadap kurikulum sejarah yang belum sesuai dengan karakteristik pengajaran sejarah. Keadaan yang demikian menarik ditelaah tentang posisi dan fungsi pengajaran sejarah dalam KTSP.

II. PEMBAHASAN

A. Analisis Kurikulum Sejarah dalam KTSP

Beberapa pakar pendidikan sejarah maupun sejarawan memberikan pendapat tentang fenomena pembelajaran sejarah yang terjadi di Indonesia diantaranya masalah model pembelajaran sejarah, kurikulum sejarah, masalah materi dan buku ajar atau buku teks, profesionalisme guru sejarah dan lain sebagainya. Yang pertama adalah masalah model pembelajaran sejarah. Menurut Hamid Hasan dalam Alfian (2007) bahwa kenyataan yang ada sekarang, pembelajaran sejarah jauh dari harapan untuk memungkinkan anak melihat relevansinya dengan kehidupan masa kini dan masa depan. Mulai dari jenjang SD hingga SMA, pembelajaran sejarah cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama. Tidak aneh bila pendidikan sejarah terasa kering, tidak menarik, dan tidak memberi kesempatan kepada anak didik untuk belajar menggali makna dari sebuah peristiwa sejarah.

Pendapat tersebut disebabkan kurikulum pendidikan sejarah selalu diasosiasikan dengan pandangan yang dinamakan ”*Perenialisme*” yang memandang bahwa pendidikan sejarah haruslah mengembangkan tugas sebagai wahana *transmission of culture*. Menurut pandangan ini maka pengajaran sejarah hendaklah diajarkan sebagai pengetahuan yang membawa siswa pada penghargaan yang tinggi terhadap ”*the glorius past*”. Kurikulum sejarah diharapkan dapat mengembangkan kemampuan anak didik dan generasi penerus untuk menghargai hasil karya agung bangsa di masa lampau, memupuk rasa bangga sebagai bangsa, rasa cinta tanah air, persatuan dan kesatuan nasional.

Pandangan kedua adalah pandangan esensialisme. Menurut pandangan ini kurikulum sejarah haruslah mengembangkan pendidikan sejarah sebagai pendidikan disiplin ilmu dan bukan hanya terbatas pada pendidikan pengetahuan sejarah. Dalam pandangan aliran esensialisme siswa yang belajar sejarah haruslah diasah kemampuan intelektualnya sesuai dengan tradisi intelektual sejarah sebagai disiplin. Kemampuan intelektual keilmuan antara lain menghendaki kemampuan berpikir kritis dan analitis terutama dikaitkan dengan konteks berpikir yang didasarkan filsafat keilmuan. Pendidikan berpikir yang bersifat lateral menjadi kepedulian pendidikan sejarah yang mendasarkan diri pada pandangan pendidikan esensialisme.

Pandangan ketiga dalam pandangan kurikulum sejarah adalah pandangan rekonstruksi sosial. Dalam pandangan ini kurikulum pendidikan sejarah haruslah diarahkan pada kajian yang menyangkut kehidupan masa kini dengan problem masa kini. Pengetahuan sejarah diharapkan dapat membantu siswa mengkaji masalah yang ada dalam kedalaman yang memadai dan mendasar untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan, membentuk kemampuan pada diri siswa untuk mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dimana ia menjadi anggotanya, dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan masyarakat pada masa sekarang.

Orientasi kepada kehidupan masa kini dalam pandangan ini menuntut siswa menggunakan pengetahuan dan pemahamnannya mengenai kecendungan-kecendrungan yang terjadi di masa lampau sebagai pelajaran yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan siswa masa kini.

Pandangan tersebut di atas dalam pengembangan kurikulum sejarah hendaknya terintegrasi, artinya sebagai wahana pendidikan, kurikulum sejarah harus memperhatikan kepentingan siswa, harapan terhadap tugas yang akan mereka emban di masa mendatang berdasarkan tantangan yang dapat diperkirakan dan sifat khas materi pendidikan sejarah, di atas kepentingan kategorisasi keilmuan yang eksklusif dan tajam. Artinya kurikulum pendidikan sejarah dapat diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan seperti pengembangan rasa kebangsaan, kebanggaan atas prestasi gemilang masa lalu bangsa, kesadaran akan dirinya sebagai individu dari anggota masyarakat/bangsa, kemampuan berpikir analitais dan kritis, memiliki kemampuan prosesual khas sejarah, kemampuan prosesual bermasyarakat, mampu menarik pelajaran dari peristiwa masa lampau untuk digunakan dalam melanjutkan prestasi gemilang bangsa bagi kehidupan masa sekarang dan yang akan datang (Hamid Hasan, 1988).

Namun tugas berat yang diemban oleh sejarah akan semakin berat dengan alokasi waktu yang yang sangat minim hanya 1 jam pelajaran dan itupun terintegrasi dalam materi IPS di SMP, tentu tujuan pendidikan sejarah yang tercakup dalam pandangan perenialisme, esensialisme, dan pandangan rekonstruksi sosial sulit akan dicapai. Demikian pula materi sejarah di SMA, seperti yang dikemukakan Hamid Hasan (1996) sesuai dengan fungsi institusional SMA dan kematangan psikologis siswa, tujuan kurikulum sejarah di SMA dapat diarahkan pada kemampuan berpikir kritis, analisis, dan keterampilan prosesual yang didasarkan pada disiplin ilmu sejarah. Mereka sudah dapat mulai diperkenalkan dengan berbagai cara kerja, cara analisis dan juga wawasan keilmuan sejarah. Hal ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan dan mempersiapkan peserta didik untuk memasuki pendidikan yang lebih tinggi. Dalam jenjang ini pendidikan sejarah tidak lagi menambah keluasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi tetapi mendalami peristiwa tertentu, dengan kata lain pendidikan sejarah di SMA diarahkan kepada tujuan pendidikan sejarah sebagai disiplin ilmu. Namun jika dianalisis seperti dibawah ini maka kurikulum sejarah perlu untuk dicermati kembali:

1. Contoh mata pelajaran sejarah dalam KTSP (SMA) serta analisis berkaitan dengan karakteristik pembelajaran sejarah adalah :

Kelas	Sem	Al wkt	Jur	Standar Kompetensi	Kompetensi Dasar

X	1	1		Memahami prinsip dasar ilmu sejarah	Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah Mendeskripsikan tradisi sejarah dalam masyarakat Indonesia masa pra-aksara dan masa aksara Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah

Berdasarkan Standar Kompetensi dan kompetensi Dasar, terdapat Kompetensi Dasar menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarah di kelas X semester 1, akan pas kalau diberikan kelas XII semester 2, sehingga ada kontinuitas dengan Perguruan Tinggi. Alasan yang dapat dikemukakan di sini adalah siswa-siswa tersebut haruslah mempunyai penguasaan materi kesejarahan yang cukup dan mumpuni, dan metodologi penelitian sejarah yang kuat (G.J Renier (1997:113).

Hal lain yang perlu menjadi sorotan kita bersama adalah jumlah jam sejarah yang semakin berkurang, kalau kita lihat pada masa orde baru (kurikulum 1994), mata pelajaran sejarah tetap bisa diperjuangkan 2 jam pelajaran setiap jenjang pendidikan, namun kini terbalik keadaannya, jumlah jam sejarah dikurangi atau tidak merata lagi seperti dalam analisis alokasi waktu dalam KTSP di SMA, kelas X semester 1 hanya mendapat 1 jam pelajaran sejarah, di semester 2 mendapat 2 jam pelajaran sejarah. Di kelas XI IPS dan kelas XII IPS semester 1 dan 2 mendapat 3 jam pelajaran. Kelas XI IPA semester 1 dan 2 hanya mendapat 1 jam pelajaran. Sementara kelas XI bahasa dan kelas XII bahasa semester 1 dan 2 hanya mendapat 2 jam pelajaran sejarah. Seharusnya pakar sejarah yang duduk di pusat bisa memperjuangkan pemerataan jam sejarah dan bisa diperjuangkan agar pelajaran sejarah bisa masuk UNAS.

B. Kontroversi Buku Teks Sejarah

Bambang Purwato (2009:1) menyatakan kontroversi dalam pembelajaran sejarah adalah sejarah sebagai materi bahan ajar, atau kurikulum sebagai sebagai hasil kebijakan birokratis-akademis untuk memandu perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Senada dengan pendapat tersebut Asvi Warman Adam (2009) kontroversi mengandung makna perdebatan, persengketaan, pertentangan.

Kontroversi dalam meteri sejarah tidak dipersoalkan pada masa Orde Baru, hal tersebut bisa dimaklumi karena Orde Baru termasuk pemerintahan yang otoriter, yang tidak memberikan celah adanya kebebasan berpendapat. Hanya boleh ada satu versi sejarah (resmi), yang berbeda akan dilarang. Kontroversi sejarah dimulai ketika bulan Desember 1965 Jenderal Abdul haris Nasution mengerahkan dosen UI dan asisten dosen sejarah UI untuk membuat crash program buku ”40 hari kegagalan

G30S". Versi tentara kemudian menjadi versi pemerintah telah dikeluarkan tanpa terlebih dahulu melakukan penelitian yang mendalam.

Di Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia jilid 6 yang disunting Nugroho Notosusanto tahun 1975 yang uraiannya semakin lengkap, dijadikan rujukan menjadi bahan bacaan untuk SMA dan SMP. Kritik dilakukan oleh sejarawan UGM Sartono Kartodirdjo dengan mengundurkan diri sebagai tim penulis Sejarah Nasional Indonesia. Kontroversi lainnya Tahun 1984 terbit buku Pejuang dan Prajurit yang disunting Nugroho Notosusanto, wajah Sukarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945 tidak kelihatan. Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo langsung memprotes dengan menelpon penerbit Sinar Harapan. Dalam cetakan kedua tahun 1986, sosok Sukarno sudah muncul kembali.

Pasca reformasi yang ditandai dengan kebebasan mengeluarkan pendapat termasuk kemerdekaan pers, muncul kritik terhadap monopoli kebenaran sejarah yang dimiliki penguasa. Penghentian film penghianatan G30S/PKI dilakukan sejak tanggal 30 September 1998. Padahal sejak tahun 1980-an film ini merupakan tayangan wajib seluruh saluran televisi setiap malam menjelang percobaan kudeta 1965. Pihak AURI meluruskan sejarah mereka antara lain melalui buku Menyingkap Kabut Halim 1965. Dalam buku tersebut pihak Angkatan Udara ingin memperlihatkan bahwa Halim Perdanakusuma bukan sarang PKI, pembunuhan para jenderal terjadi di Lubang Buaya bukan di pangkalan angakatan udara. Ada anggota AURI yang terlibat G30S, tetapi bukan sebagai institusi. Kedatangan Sukarno ke Halim bukan persekongkolan melainkan prosedur operasi baku penyelamatan presiden pada suasana darurat.

Kontroversi dalam sejarah memang tidak bisa dilepaskan dari karakteristik pembelajaran sejarah itu sendiri, yang oleh Widja (1996) dikatakan pelajaran sejarah memang sulit membebaskan diri dari misi serta cirinya yang khas sebagai pembentuk citra diri bangsa yang tidak lain sebagai suatu amanat politis yang harus diemban pelajaran sejarah sepanjang masa. Pendapat ini senada dengan Surjomiharjo (1996) yang menyatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda, melalui zaman Jepang, dan masa merdeka sekarang ini, pendidikan sejarah tidak dapat dilepaskan dari pandangan politis yang dominan pada suatu masa.

Ketika pasca reformasi bergulir banyak fakta sejarah baru yang terungkap. Seperti Inspirator serangan 1 Maret 1949 atas Yogyakarta ternyata adalah Sri Sultan Hamangku Buwono IX . Kontroversi lain juga muncul ketika orang mulai mempertanyakan kembali otentisitas naskah Supersemar yang diberikan Soekarno kepada Soeharto, menjelang terjadinya peralihan kekuasaan, yang disinyalir bukan naskah asli dan isinya tidak memuat apa yang sesungguhnya dikehendaki Soekarno saat itu. Dan, beberapa waktu, hangat pula dibicarakan seputar buku Habibie yang mengundang kontroversi baru karena mengungkapkan fakta yang dibantah oleh Prabowo sebagai salah satu pelaku sejarah dalam peristiwa yang dikisahkan Habibie di dalam bukunya tersebut. Masih banyak contoh lainnya yang bisa disebutkan. Di antaranya yang agak ringan dan sempat menghiasi kontroversi pelajaran sejarah adalah soal pembabakan sejarah, soal perbedaan orientasi dalam pendidikan sejarah dan padatnya materi pelajaran sejarah di

sekolah-sekolah, sampai soal keaslian wajah Gajah Mada yang bertahun-tahun sempat akrab di benak kita sejak SD.

Permintaan Mendiknas Kontroversi kurikulum sejarah saat ini yang terungkap setelah adanya pemeriksaan Kejaksaan Agung terhadap Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas, dan dilanjutkan dengan pelarangan terhadap sejumlah buku-buku pelajaran sejarah menarik untuk kita cermati. Peristiwa tersebut bermula dari permintaan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo kepada Kejaksaan Agung untuk memeriksa buku-buku pelajaran sejarah tingkat SMP sampai SMA sederajat yang tidak mencantumkan kata PKI pada penyebutan G 30 S. Buku-buku itu dinilai tidak sesuai dengan kurikulum. Kejaksaan Agung sendiri menyebutkan bahwa pemeriksaan ini sebagai bagian dari prosedur untuk memastikan apakah buku-buku tersebut memiliki potensi mengganggu ketertiban umum atau tidak

Pertanyaannya sekarang, salahkah para penyusun buku tersebut menghilangkan kata PKI sehingga buku-buku mereka harus ditarik dari peredaran? Apakah buku-buku tersebut selama terbitnya telah menimbulkan gangguan ketertiban umum? Jika acuannya adalah Kurikulum 2006 yang sah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 yang telah mencantumkan kata PKI pada penyebutan G30 S, maka penyusunan buku tersebut memang patut dipertanyakan, terlepas dari kenyataan bahwa gerakan tersebut secara riil hanya menyebutkan gerakannya sebagai G 30 S Persoalannya, tidak sedikit buku pelajaran sejarah yang terbit saat itu disusun berdasarkan Kurikulum 2004 yang memang sudah menghilangkan kata PKI. Bahkan, salah satu indikator dari kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik adalah membandingkan beberapa pendapat tentang peristiwa Gerakan 30 September. Salah satu buku pelajaran sejarah yang terbit di Jakarta untuk siswa SLTA kelas 3 dan disusun dengan cara mengikuti versi Kurikulum 2004 telah mengutip beberapa pendapat yang berbeda versinya satu dengan yang lain dalam mengungkap peristiwa G 30 S tersebut. Secara keilmuan buku ini cukup objektif, artinya ditulis dengan menyertakan lebih dari satu pendapat. Akan tetapi, persoalannya menjadi semakin rumit ketika Mendiknas menyatakan bahwa Kurikulum 2004 merupakan kurikulum eksperimen buatan Pusat Kurikulum Depdiknas yang belum disahkan. Artinya, buku-buku sejarah tersebut dinilai tidak sesuai dengan kurikulum “resmi” yang berlaku saat itu dan saat ini, yaitu Kurikulum 1994 dan Kurikulum 2006. Mungkin kita patut mempertanyakan alasan para penyusun buku pelajaran sejarah tersebut, mengapa mereka sampai mengadopsi Kurikulum 2004, yang sebenarnya masih merupakan eksperimen dan belum disahkan. Akan tetapi, sebelum pertanyaan tersebut bergulir, patut pula kita ajukan pertanyaan mendasar: mengapa Kurikulum 2004 yang masih merupakan eksperimen tersebut telah diterbitkan oleh pusat kurikulum, apalagi disertai dengan kata pengantar oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas? Bagaimana mempertanggungjawabkan kurikulum eksperimen yang dinyatakan belum sah dan terdapat kekeliruan tetapi sudah dilaksanakan di sejumlah sekolah? Perlu diingat, eksperimen terhadap kurikulum berarti melakukan eksperimen

terhadap jutaan anak-anak Indonesia! Terlalu berlebihan Saat ini sejumlah buku sejarah di tingkat SMP-SMA sederajat yang ditulis berdasarkan Kurikulum 2004 telah dilarang oleh Kejaksaan Agung dan wajib ditarik dari peredaran. Sebagai pihak yang berwenang, tentu kita dapat memaklumi tindakan Kejaksaan Agung meneliti dan menyelidiki buku-buku yang "dianggap" dapat mengganggu ketertiban umum. Hanya saja, kekhawatiran akan terjadinya gangguan ketertiban umum dalam konteks pembelajaran sejarah tentu dapat dikatakan berlebihan. Sebab, kenyataannya materi sejarah tentang peristiwa tahun 1965 yang diajarkan oleh guru-guru sejarah sebenarnya tetap mengacu pada Kurikulum 1994. Penyitaan buku sejarah kurikulum 2004 didasarkan pada Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor 019/A-JA/10/ 2007 tanggal 5 Maret 2007 tentang pelarangan buku sejarah tahun 2004 dan Surat Perintah Kejaksaan Agung Nomor Ins. 003/A-JA/03/ 2007 tentang instruksi penarikan buku sejarah kurikulum 2004 dari wilayah Indonesia .

Menurut Hasan , sejarah di sekolah itu bukan sejarah murni. Artinya, terdapat upaya untuk membangun sikap dan mentalitas bangsa. Misalnya dalam pandangan resmi pemerintah, PKI terlibat. Jangan sampai sejarah menimbulkan kebencian karena masa lalu dianggap musuh. Ketika Orde Lama jatuh, setiap hal yang berkaitan dengan Orde Lama dihindari, ketika Orde Baru runtuh, setiap hal yang berkaitan dengan Orde Baru dijauhi. Kisah sejarah mungkin gelap, atau cemerlang, dan justru dari sana kita belajar, bukan berarti memusuhinya. Orang yang bersalah dan mendapat hukuman tidak perlu diungkit terus menerus, apalagi sampai diwariskan ke generasi penerusnya. Namun tidak lantas membuat kita menjadi tidak waspada. Kewaspadaan yang hadir seyogyanya tidaklah berlebihan. Menurut Sjamsudin, tidak masalah mengetengahkan isu-isu kontroversial dalam sejarah bangsa kepada siswa, justru akan membuat mereka menjadi kritis, hanya saja perlu dibuat arahan . Guru harus berhati-hati dan berupaya untuk menyesuaikan materi dengan tingkat pemikiran siswa. Siswa sekolah dasar dan menengah pertama biasanya berpikir konkret, jadi diupayakan bagaimana mengemas materi agar sesuai dengan perkembangan mereka yang berbeda dari cara berpikir siswa SMA, apalagi logika berpikir mahasiswa. *(*http:// isolapos.upi.edu/arsip/naskah.php?edisi=37&halaman=5*). Pendapat ini senada dengan Abdullah (1996) yang menyatakan bahwa sebagai hasil proses belajar, pendidikan/pengajaran sejarah mestinya lebih mengutamakan pencapaian nilai intinsik berupa "learning capacity" yang menjadi pangkal pengembangan kemampuan nalar, karena sejarah sebagai substansi proses pendidikan sejarah pada hakekatnya adalah corak wacana intelektual yang kritis dan rasional, bukan kotbah tentang kisah masa lampau.*

Apabila karakteristik pelajaran sejarah seperti ini, ditarik dalam konteks strategi metodologisnya akan terlihat suatu kecendrungan bahwa pengajaran sejarah akan sulit pula membebaskan diri dari orientasi penyajian yang berbau ekstrinsik/instrumental. Pengajaran sejarah akan cenderung mengutamakan pendekatan reseptip dalam arti meminimalkan peluang learning *capasity* untuk lebih memperkokoh proses *self-knowledge* dan *self-understanding* yang diharapkan (Widja, 1996 : 179). Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), khususnya sejarah,

sering dianggap sebagai pelajaran hafalan dan membosankan. Pembelajaran ini dianggap tidak lebih dari rangkaian angka tahun dan urutan peristiwa yang harus diingat kemudian diungkap kembali saat menjawab soal- soal ujian. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, karena masih terjadi sampai sekarang. Pembelajaran sejarah yang selama ini terjadi di sekolah-sekolah dirasakan kering dan membosankan. Menurut cara pandang pedagogy kritis, pembelajaran sejarah seperti ini dianggap lebih banyak memenuhi hasrat dominant group seperti rezim yang berkuasa, kelompok elit, pengembang kurikulum dan lain-lain, sehingga mengabaikan peran siswa sebagai pelaku sejarah zamannnya (Anggara, 2007:101).

Apa yang harus dilakukan guru sejarah untuk mengantisipasi keadaan ini? Sebagai guru sejarah atau sejarawan pendidik kita harus memberikan apresiasi terhadap KTSP yang sedang dilaksanakan, karena kandungan kurikulumnya menciptakan suasana ilmiah sekaligus nasionalis. Kontroversi G30S PKI tidak hanya sebatas pembubuhan 3 huruf setelah G30S yang kemudian terselesaikan, akan tetapi tersajikan berbagai versi terhadap tafsiran peristiwa tahun 1965, yang amat memungkinkan mengajak anak didik untuk berpikir kritis sekaligus menilai. Hal tersebut dimungkinkan karena penjabaran di sekolah oleh guru sejarah terhadap standar kompetensi, kompetensi dasar, sampai dengan indikator yang sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kemudian menemukan berbagai kendala. Sedangkan untuk mengatasi permasalahan buku teks harus ada kriteria yang baik. Salah satu kriteria buku cetak yang baik menurut Kochar (2008) adalah buku cetak harus bersih dari indoktrinasi. Buku cetak harus menyajikan pandangan yang adil tentang berbagai macam ide yang disampaikan pada fase kehidupan tertentu. Buku ini harus tidak mengandung sekumpulan pendapat yang sempit, tidak mengandung terlalu banyak nasionalisme hingga cenderung membelenggu, kaku, dan resmi. Buku ini harus tidak menanamkan kebiasaan memberikan tanggapan secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu, penilaian yang menyakitkan dan tanggapan yang emosional. Pandangan yang bias dan prasangka penulis harus tidak tercermin didalam lembaran buku cetak. Buku cetak yang dipergunakan siswa harus mengatakan kebenaran yang sesungguhnya, dan tidak ada yang lain selain kebenaran.

Ada bahaya dibalik pemakaian buku cetak tunggal karena akan menciptakan batasan-batasan. Siswa cenderung mengembangkan ide yang salah bahwa sejarah sama artinya dengan buku cetak. Dan sebagus apapun buku tersebut tidak akan cukup untuk mendukung siswa dalam belajar. Jadi, saran alternatifnya adalah gunakan buku cetak tunggal sebagi pendukung, dan sediakan serangkaian buku cetak lainnya yang masing-masing mewakili subjek permasalahan dari sudut pandang yang berbeda. Cara ini akan meminimalkan kecenderungan untuk bergantung sepenuhnya pada buku cetak. Selain itu, siswa akan mampu membandingkan dan menyelaraskan sudut-sudut pandang yang berbeda (Kochar, 2008:175).

Selama ini, guru hanya melaksanakan apa yang digariskan dalam uraian kurikulum, tapi tidak demikian pada kurikulum sekarang ini. Salah satu makna didalamnya ialah jangan masih terkungkung sebagai “guru sejarah yang birokratif”,

yang hanya mengikuti apa yang diinstruksikan atasan, akan tetapi, dengan KTSP haruslah menjadi "guru sejarah yang profesional", yakni guru yang menentukan, berpikir kreatif, dan kontekstual. Dengan demikian, seharusnya kurikulum sejarah untuk sekolah, diwujudkan menjadi pembelajaran yang bermakna, tidak sekedar hafalan belaka. Menurut Sardiman, seharusnya pembelajaran sejarah yang bermakna lebih menanamkan kesadaran sejarah, yakni belajar masa lampau untuk membangun hari depan lebih baik. Sejarah bukan selalu identik masa lalu. Kita harus menarik materi sejarah dalam dimensi kekinian dengan mendekatkan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan kedekatan masalah peserta didik.

III. PENUTUP

Perubahan besar yang melanda Indonesia tidak bisa dilepaskan karena faktor globalisasi, atau memasuki abad ke-21 yang disebut abad ilmu pengetahuan perlu disiapkan secara dini tamatan sejarah yang memiliki kompetnsi yang dibutuhkan agar bisa hidup atau sukses pada abad ilmu pengetahuan. Untuk itu calon guru sejarah harus mengisi diri dengan berbagai keterampilan mengajar dan secara terus-menerus menimba pengetahuan dengan membaca buku-buku baru yang bernuansa sejarah.

Penting juga apa yang diekmukakan oleh Widja (2002), bahwa harus ada upaya terus-menerus meningkatkan profesionalisme guru sejarah antara lain menyangkut harga diri yang tinggi sebagai pengemban profesi guru sejarah, penguasaan pengetahuan sejarah yang luas, mendalam serta mutahir, penguasaan keterampilan yang tinggi dalam strategi pembelajaran sejarah, sikap kreatif inovatif serta antisipatif terhadap perkembangan serta tuntutan zaman.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah, seorang sejarawan pendidik tidak usah takut untuk memberikan materi sejarah yang kontroversial, hal ini penting agar bisa melatih siswa di sekolah agar bisa berpikir kritis analitis terhadap jalannya peristiwa sejarah, apalagi KTSP memberikan ruang gerak yang demikian luas sehingga pembelajaran sejarah tidak kering dan membosankan. Lambat laun sejarah tidak lagi dalam posisi termarjinalkan di kalangan siswa, serta mampu menghilangkan sikap yang pesimis terhadap pelajaran sejarah di semua jenjang pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfian, Magdalia. 2007. 'Pendidikan Sejarah dan Permasalahan yang Dihadapi'. *Makalah.* Disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (IKAHIMSI). Universitas Negeri Semarang, Semarang, 16 April 2007.

Anggara, Boyi. 2007. 'Pembelajaran Sejarah yang Berorientasi pada Masalah-Masalah Sosial Kontemporer'. *Makalah*. Disampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Se-Indonesia (IKAHIMSI). Universitas

Negeri Semarang, Semarang, 16 April 2007

Abdullah, Taufik. 1996. Di sekitar Pengajaran Sejarah yang Reflektif dan Inspiratif. Dalam Sejarah No. 6 (Februari 1996).

Asvi Warman Adam. 2005. ”Artikel” *Perubahan Kurikulum Sejarah Jangan Hanya Materi*. (http://www.suarapembaruan.com/News/2005/12/02/). Di akses tanggal 24 April 2009.

Asvi Warman Adam. 2009. *Kontroversi: Proses dan Implikasi Bagi Pengajaran Sejarah* (Makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional, tanggal 28 Mei 2009 di UNS.

Bambang Purwanto. 2009. Sejarah, Kurikulum dan pembelajaran Kontroversi: Sebuah Catatan Diskusi (makalah). Disampaikan dalam Seminar Nasional, tanggal 28 Mei 2009 di UNS.

Dudung Abdurahman. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : AR-RUZZ MEDIA

Elliot, S.N. et al. 2000. Educational Psychologi: Effective Teaching, Effetive Learning. Boston. Mc. Graw Hill.

Hamid Hasan. 1988. *Pendidikan Sejarah di SMA*. Makalah di sajikan dalam Seminar Nasional Sejarah di Bandung.

---------- 1996. *Kurikulum dan Buku Teks Sejarah*. Jakarta : Depdikbud.

----------UPI, *Menyingkap Kontroversi Kurikulum Sejarah 2004*, 2006, *(*http://isolapos.upi.edu/arsip/naskah.php?edisi=37&halaman=5*)*. Diakses tanggal 23 April 2009.

Kochar, S.K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta : Grasindo

Kuntowijoyo. 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta : Bentang Budaya.

Renier, G.J. 2000. *Metode dan Manfaat Ilmu Sejarah*. Muin Umar (Penerjemah). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sartono Kartodirdjo. 2005. *Sejak Indische Sampai Indonesia*. Jakarta : Kompas.

Suparman. 2008. “Artikel” *Kontroversi Sejarah dan “Kurikulum Eksperimen*”. (http://www.atmajaya.ac.id/content.asp?f=0&id=3549) . Di akses tanggal 24 April 2009.

Surjomihardjo. Abdurrachman.1996.” Pendidikan Sejarah dalam Tiga Zaman”. Dalam Sejarah No. 6 (Februari 1996).

Widja, I Gde. 1996. *Permasalahan Metodologi dalam Pengajaran Sejarah di Indonesia Suatu Tinjauan Reflektif Dalam Mengantisipasi Perkembangan Abad XXI*. Dalam Konggres Nasional Sejarah 1996 Sub Tema Perklembangan Teori dan Metodologi dan Orientasi Pendidikan Sejarah. Jakarta : Depdikbud.